



M. SASTRAPRATEDJA, S.J

PANCASILA
SEBAGAI
VISI DAN REFERENSI
KRITIK SOSIAL

PENERBITAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2001

PANCASILA
sebagai
VISI DAN REFERENSI
KRITIK SOSIAL

M. Sastrapratedja, S.J.

PENERBITAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2001

Pancasila sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial

Penerbitan Universitas Sanata Dharma
Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002
Telepon (0274) 513301, 515352 Fax: (0274) 562383
Jl. Gejayan, Mrican, Yogyakarta 55281
E-mail: lemlit@usd.ac.id

Cetakan Pertama 2001

ISBN 979-8927-46-X

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.

PENGANTAR

Pancasila telah diterima oleh bangsa Indonesia sebagai ideologi negara, yaitu sebagai dasar filsafat negara. Sebagai ideologi Pancasila berfungsi sebagai integrasi dan legitimasi terwujudnya bangsa dan negara Indonesia. Tetapi Pancasila yang terdiri dari atas nilai-nilai kemanusiaan dapat berfungsi pula sebagai "utopia", yaitu sebagai cita-cita yang secara bertahap ingin diwujudkan. "Utopia" di sini bukan dalam pengertian "angan-angan" yang tak mungkin diwujudkan, tetapi "utopia yang relevan" (J. Galtung), yang menjadi lawan dari dystopia, yaitu keadaan yang tak diinginkan. Maka Pancasila dapat menjadi dasar pengembangan visi masyarakat masa depan dan referensi kritik sosial. Kritik hanya dapat dilakukan atas dasar sesuatu yang normatif.

Sebagaimana Paul Ricoeur mengatakan, fungsi ideologi adalah integrasi, yaitu pelestarian identitas kelompok - dalam hal ini identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia - sementara fungsi utopia adalah "eksplorasi apa yang mungkin". Ideologi berfungsi pula sebagai legitimasi kekuasaan, artinya kekuasaan negara dan pelaksanaan kekuasaan negara menjadi sah dan dapat diterima, kalau berpegang pada Pancasila. Dari aspek ini, maka fungsi utopia adalah menantang kekuasaan, yang pada umumnya cenderung menjadi totalitarian atau disalahgunakan. Dalam hal ini Pancasila dianggap sebagai nilai-nilai atau prinsip yang normatif. Atas dasar itu realitas sosial-politik dievaluasi dan dikritik.

Bab 1 dari tulisan ini mencoba melihat bagaimana Pancasila sebagai nilai-nilai kemanusiaan dapat menjadi nilai-nilai yang menjadi rujukan Pembangunan Nasional. Pembangunan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila itu dapat menjadi "model pembangunan alternatif. Pengembangan "civil society" juga memerlukan "nilai-nilai yang berkelanjutan" (*sustainable values*). Di sini Pancasila dalam interaksi dengan nilai-nilai baru dapat

menjadi *sustainable values* bagi *civil society*. Selanjutnya dalam Bab 2 diperlihatkan bahwa identitas bangsa Indonesia yang mengacu pada Pancasila bukanlah identitas yang statis, tetapi identitas yang terus menerus berkembang berhadapan dengan berbagai tantangan baru, khususnya tantangan pluralisme dan globalisasi. Identitas nasional bukanlah suatu bawaan sejak lahir, tetapi dibentuk dan ditransformasikan melalui sosialisasi dari budaya nasional berhadapan dengan tantangan baru. Oleh karena itu terus menerus harus dirumuskan kembali. Suatu bangsa tidak hanya merupakan entitas politik, tetapi juga suatu komunitas simbolik, yang melahirkan perasaan akan suatu identitas dan loyalitas. Identifikasi dan kesetiaan pada suku, agama, daerah dan bahasa secara bertahap diangkat ke dalam kesetiaan yang lebih luas yang oleh Gellner disebut "atap politik" negara-kebangsaan. Negara-kebangsaan lahir bersama dengan lahirnya berbagai aspek baru dalam kehidupan, seperti kepercayaan akan ilmu pengetahuan dan teknologi, kedaulatan negara kebangsaan, rasionalitas birokratik, kecenderungan maksimisasi keuntungan dalam kapitalisme, yang keseluruhannya dapat disebut modernitas. Salah satu aspek modernitas adalah usaha untuk memahami segala sesuatu secara rasional dalam kerangka ordo universal. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau terjadi politik penyeragaman sistem dalam segala aspek kehidupan bangsa dan negara. Maka muncullah kritik pascamodernitas. Ini semua dibahas dalam Bab 3. Berkaitan dengan modernisasi, khususnya di dunia Barat telah terjadi proses sosiologis yang disebut "sekularisasi" dengan akibat memudarnya alam pikiran religius. Mulailah muncul berbagai ideologi baru. Pada Bab 4 dicoba untuk mengulas secara singkat trend perkembangan ideologi dewasa ini. Dalam hal ini Pancasila tidak dapat tidak harus masuk dalam kancah wacana ideologis. Pancasila diharapkan dapat berfungsi mencerahi bagaimana masyarakat ditransformasikan menjadi masyarakat yang adil. Hal ini dibahas pada Bab 5, disusul dengan Bab 6 yang berusaha merumuskan nilai-nilai etis yang terimplikasi dalam Pancasila.

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
1. PEMBANGUNAN BUDAYA POLITIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	1
2. KEBUDAYAAN INDONESIA DAN TANTANGAN GLOBALISASI.....	19
3. KRISIS DAN KRITIK ATAS MODERNITAS.....	31
4. TREND PERKEMBANGAN IDEOLOGI DEWASA INI	43
A. Pengertian Ideologi.....	43
B. Gejala Globalisasi	49
C. Berbagai Versi Marxisme.....	51
D. Perkembangan Sosialisme - Kapitalisme.....	61
E. Beberapa Tema Ideologis Masa Kini	72
F. Ideologi dalam Perspektif Pancasila.....	79
5. TRANSFORMASI BUDAYA MENUJU PEMERATAAN DAN KEADILAN, SUATU TINJAUAN ETIS.....	81
A. Dimensi Etis dari Ekonomi.....	81
B. Keadilan Ekonomis.....	87
C. Nilai-nilai Ekonomis dan Nilai-nilai Moral.....	90
D. Keadilan Politik	91
E. Mencari Sistem yang Menjamin Keadilan.....	92
F. Transformasi Budaya	93
6. PANCASILA DITINJAU DARI ASPEK MORAL.....	97
Sumber Tulisan	105
Catatan	106
DAFTAR PUSTAKA.....	113

Pada dewasa ini timbul tuntutan akan suatu etika baru dengan kewajiban-kewajiban etis yang lebih luas lingkungannya. Apabila dahulu kewajiban moral terbatas pada norma-norma keluarga, desa atau kelompok tertentu, sekarang tanggung jawab menjadi lebih luas, yaitu terhadap kepentingan bangsa dan negara serta berbagai institusi baru. Ada beberapa prinsip etis baru yang harus disosialisasikan: (1) prinsip kesejahteraan seluruh bangsa, bukan hanya kepentingan sendiri atau kelompok; (2) keharusan untuk bekerjasama antara berbagai kelompok untuk menghindari destruksi dan menciptakan kesejahteraan bersama; (3) penerimaan atas pluralisme, yang berarti memberi tempat bagi keanekaragaman dan artikulasi keanekaragaman dalam kerangka Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DR. M. SASTRAPRATEDJA, S.J. adalah dosen Filsafat pada Program Pascasarjana Universitas Sanata Dharma, Universitas Gajah Mada dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta; penulis buku Pendidikan Sebagai Humanisasi (2001), Agama dan Tantangan Masa Kini (2001), Allah Sebagai Dasar Ada. Filsafat dan Teologi Paul Tillich (2001)

ISBN 979-8927-46-X



9 789798 927461 >